

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Sinyal

“Teori sinyal melibatkan dua pihak yaitu manajemen sebagai pemberi sinyal dan investor sebagai penerima sinyal dari perusahaan. Manajemen akan berusaha memberikan informasi yang berguna bagi investor. Pemberian suatu isyarat atau sinyal dari manajemen kepada investor ini akan membantu investor dalam mengambil kebijakan (Spence, 2002 dalam Siswantoro, 2020)”.

“Teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. *Signaling theory* juga dapat membantu pihak perusahaan (agen), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan, perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang independen memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Saputra dan Kustina, 2018)”. “Pihak independen adalah pihak lain di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ojk.go.id)”.

“Teori sinyal (*signaling theory*) merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan. Informasi mengenai perubahan harga dan volume saham mengandung informasi dalam memberikan bukti yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005 dalam Khairudin dan Wandita, 2017)”. “Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang

baik atau buruk di masa mendatang. Apabila informasi keuangan memiliki penilaian yang baik maka informasi yang diterima investor merupakan *good news* sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham dan berujung pada perubahan harga saham. Sebaliknya bila informasi keuangan menunjukkan penilaian buruk maka informasi yang diterima investor adalah *bad news* dan memengaruhi perdagangan serta harga saham pula (Khairudin dan Wandita, 2017)".

Menurut Jogiyanto (2010) dalam Saputra dan Kustina (2018) "informasi yang dipublikasikan oleh manajemen akan memberikan sinyal bagi investor dan kreditur dalam mengambil keputusan". "Informasi yang diungkapkan oleh manajemen merupakan sinyal dari manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Keinginan pemilik salah satunya adalah *return*, yang dapat dianalisis dari laporan keuangan berupa *earnings per share (EPS)*. Laba akuntansi juga merupakan salah satu sinyal dari informasi di pasar modal. Informasi dalam (*inside information*) berupa kebijakan manajemen, rencana manajemen, pengembangan produk, strategi bisnis, dan sebagainya tidak tersedia secara publik, akhirnya akan terefleksi dalam angka laba yang dipublikasikan melalui laporan keuangan. Oleh karenanya, laba merupakan sarana bagi perusahaan untuk memberikan sinyal kepada publik (Yunia, 2018)".

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Hidayat (2018) "laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan". "Laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian. Bagian akuntansi keuangan di perusahaan akan mengolah data transaksi tersebut, baik secara manual maupun dengan sistem *ERP (enterprise resource planning)*, yang sudah biasa mereka gunakan. Keluaran (*output*) dari kegiatan bagian akuntansi keuangan tersebut adalah laporan keuangan (Prihadi, 2019)". Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2018) "tujuan

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

Berdasarkan Kasmir (2021) terdapat “keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), di mana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “lima laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan:

1. Laporan laba rugi (*income statement*) menyajikan pendapatan dan beban sehingga hasilnya laba bersih (*net income*) atau rugi bersih (*net loss*) untuk jangka waktu tertentu.
2. Laporan laba ditahan (*retained earnings statement*) menyimpulkan perubahan pada *retained earnings* untuk jangka waktu tertentu.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position/neraca*) melaporkan asset, utang, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) menyimpulkan informasi mengenai arus kas masuk (*receipts*) dan keluar (*payments*) untuk jangka waktu tertentu.
5. Laporan laba rugi komprehensif (*comprehensive income statement*) menyajikan akun pendapatan komprehensif lainnya yang tidak termasuk dalam komponen laba bersih.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), “laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode. Suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. PSAK 1 memperkenalkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas yang bukan berasal dari transaksi dengan atau kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, contoh: setoran modal atau pembagian dividen.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali.
4. Laporan arus kas selama periode. Dalam PSAK No. 2 diatur secara khusus untuk laporan arus kas. Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
5. Catatan atas laporan keuangan. Berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif mengenai periode terdekat

sebelumnya. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, seperti dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, dan asumsi dalam estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (pengelolaan modal).

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

2.3 Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2011) dalam Indriyani (2017), menyatakan bahwa “beberapa faktor penting dalam menentukan struktur modal diantaranya adalah ukuran perusahaan, struktur aktiva, *leverage*, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan”. Menurut Chen (2004) dalam Dhani dan Utama (2017), “profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya”. Pernyataan ini didukung oleh Syafri (2008) dalam Septiana (2019) “rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. “Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Selain itu, juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektivitas manajemen di sini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan (Septiana, 2019)”. Menurut Halim (2021), “perusahaan dengan rasio

profitabilitas yang tinggi akan lebih dipercaya oleh para investor karena dianggap mampu memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan”. Jannah dan Rahayu (2018) menambahkan “semakin tinggi kemampuan perusahaan membagikan pendapatannya kepada para pemegang saham, berarti semakin besar keberhasilan perusahaan dalam memakmurkan para pemegang saham”.

Weygandt *et al.* (2019) membagi rasio profitabilitas ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. “*Profit margin* mengukur persentase tiap Euro (mata uang) penjualan yang menghasilkan laba bersih.
2. *Asset turnover* mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan penjualan.
3. *Return on assets* mengukur seberapa efisien aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. *Return on ordinary shareholders’ equity* mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak euro (mata uang) dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap euro (mata uang) yang diinvestasikan oleh pemilik.
5. *Earnings per share (EPS)* mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa.
6. *Price-earnings ratio* mengukur rasio harga pasar dari setiap lembar saham biasa terhadap *earnings per share*.
7. *Payout ratio* mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai”.

2.4 Earnings Per Share (EPS)

“Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia

ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan melalui bursa efek dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen (Yarahim dkk., 2021)”. “Laba per saham atau *earnings per share (EPS)* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah bagian laba untuk setiap saham perusahaan. *EPS* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang dimiliki para pemegang saham (Mulyono dan Saraswati, 2020)”. “*EPS* adalah ukuran laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa. *EPS* dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama tahun tersebut. Hasil perhitungan *EPS* merupakan ukuran laba bersih per saham yang dapat digunakan untuk menentukan profitabilitas (Weygandt *et al.*, 2019)”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*earnings per share (EPS)* dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. *Basic earnings per share*. Struktur modal perusahaan dikatakan *simple* apabila hanya terdiri dari saham biasa atau mencakup saham biasa yang secara potensial tidak mempunyai efek dilutif. Dalam kasus ini, perusahaan melaporkan *basic earnings per share*. Struktur modal perusahaan dikatakan *complex* apabila terdapat sekuritas (potensi saham biasa) yang memiliki efek dilutif pada laba per lembar saham biasanya. Dalam kasus ini, perusahaan melaporkan *basic* dan dilutif laba per lembar saham. Jika suatu perusahaan memiliki saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa.
2. *Diluted earnings per share*. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dan setelah dikonversi, sekuritas dilutif akan menurunkan *earnings per share*. Bersifat struktur modal kompleks ketika perusahaan mempunyai sekuritas konvertibel, opsi, waran atau hak-hak lainnya

atas konversi atau penggunaan yang dapat mendilusi laba per lembar saham. Menghitung *EPS* terdilusi mirip dengan menghitung *basic EPS*. Perbedaannya adalah bahwa *EPS* dilusian mencakup dampak dari seluruh potensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Beberapa sekuritas bersifat antidilutif. Sekuritas antidilutif adalah sekuritas yang pada saat dikonversi atau pelaksanaan meningkatkan laba per saham (atau mengurangi kerugian per saham). Perusahaan dengan struktur modal yang kompleks tidak akan melaporkan *EPS* terdilusi jika sekuritas dalam struktur modalnya bersifat antidilutif. Tujuan penyajian *EPS* dasar dan dilusian adalah untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan tentang situasi yang kemungkinan akan terjadi (*basic EPS*) dan juga untuk memberikan situasi dilutif “kasus terburuk” (*EPS* dilutif). Ketika perusahaan mengkonversi sekuritas dengan saham biasa maka perusahaan akan mengukur efek dilutif dari potensi konversi pada *EPS* menggunakan metode *if-converted*. Metode ini mengasumsikan konversi sekuritas dilakukan awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas, dan menghapus bunga terkait, setelah pajak. Perusahaan menggunakan metode *treasury share* untuk memasukkan opsi dan waran dan ekuivalennya ke dalam *EPS*. Metode *treasury* mengasumsikan bahwa opsi atau waran dilaksanakan pada awal periode dan bahwa perusahaan menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa”.

Menurut Juliana dan Arif (2019) “apabila nilai *EPS* yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham tinggi maka hal ini akan menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham, dan begitu juga sebaliknya”. Menurut Mulyono dan Saraswati (2020) “semakin tinggi nilai *EPS* dapat diartikan semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, serta semakin besar kemungkinan adanya peningkatan dividen yang akan diterima pemegang saham sehingga akan menarik calon pemegang saham untuk menanamkan modalnya di perusahaan”. Nilai *earnings per share* berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), dirumuskan sebagai berikut:

$$EPS = \frac{Net\ Income - Preference\ Dividends}{Average\ Ordinary\ Shares\ Outstanding\ (WAOS)} \quad (2.1)$$

Keterangan:

EPS : Laba per lembar saham.

Net Income : Laba tahun berjalan.

Preference Dividends : Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen.

WAOS : Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

“Proses memperoleh *net income* dimulai dari menghitung penjualan bersih didapat dari pendapatan penjualan dikurangi dengan pengembalian penjualan dan diskon penjualan. Penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan beban usaha menghasilkan laba dari usaha. Laba dari usaha ditambah dan dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak menghasilkan laba bersih setelah pajak (Weygandt *et al.*, 2019)”. Secara singkatnya menurut Soemarso (2004) dalam Siregar (2022), “laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk satu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi”.

“Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai atau dividen saham (BEI, 2021)”. “Pemilik saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen sebelum pemilik saham biasa. Saham preferen sering mengandung fitur dividen kumulatif. Fitur ini menetapkan bahwa pemegang saham preferen harus dibayar baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa dibayar dividennya. Ketika saham preferen bersifat kumulatif, maka dividen preferen yang tidak diumumkan dalam periode tertentu disebut dividen tunggakan (Weygandt *et al.*, 2019)”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*outstanding shares* artinya saham yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh pemegang saham”. “Dalam semua perhitungan laba per saham, rata-rata jumlah saham yang beredar selama periode tersebut merupakan dasar untuk setiap lembar saham yang diterbitkan. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama

periode berjalan memengaruhi jumlah saham yang beredar (Kieso, *et al.*, 2018)”. Kieso, *et al.* (2018) menuliskan rumus *weighted-average ordinary shares outstanding* sebagai berikut:

$$WAOS = Shares\ Outstanding \times Fraction\ of\ Year \quad (2.2)$$

Keterangan:

Shares Outstanding : Jumlah saham beredar.

Fraction of Year : Pecahan tahun.

2.5 Leverage

Menurut Tantri (2010) dalam Juliana dan Arif (2019) “tujuan utama setiap perusahaan adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan kebijakan *leverage* dalam mengembangkan usahanya”. Kebijakan *leverage* adalah “kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan dengan menggunakan modal dari sumber internal maupun eksternal. Sumber pendanaan internal didapat dari dalam perusahaan seperti modal sendiri dan laba ditahan, sedangkan sumber pendanaan eksternal merupakan dana yang diperoleh dari pihak luar perusahaan seperti bank (Masdupi, 2005 dalam Nurjanah dan Purnama, 2020)”. Menurut Jannah dan Rahayu (2018), “dana tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan perusahaan”. Menurut Kurnia (2017) “rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya”. Menurut Brigham dan Houston (2019), “struktur modal adalah komposisi dari utang, saham preferen, dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai asset perusahaan”.

Menurut Brigham dan Houston (2019), “factor-faktor yang perlu diperhatikan perusahaan ketika membuat keputusan terkait struktur modal, diantaranya:

1. “Stabilitas penjualan, perusahaan yang memiliki penjualan relatif stabil dapat lebih aman menerima banyak utang daripada perusahaan dengan penjualan tidak stabil.
2. Struktur asset, banyak perusahaan juga tetap memerlukan kepemilikan uang tunai yang mereka inginkan ketika menetapkan struktur modal mereka. Sebuah perusahaan dapat mengambil lebih banyak utang jika memiliki lebih banyak uang tunai dalam neraca keuangan.
3. *Leverage* operasi, perusahaan dengan *leverage* operasi yang lebih rendah akan mampu menerapkan *leverage* keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih kecil.
4. Tingkat pertumbuhan, jika hal lain dianggap sama maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang. Namun, pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut seringkali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi sehingga cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.
5. Profitabilitas, sering kali perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.
6. Bunga, bunga merupakan suatu beban pengurang pajak dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi.
7. Kendali, pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat memengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki

kendali hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru.

8. Sikap manajemen, manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan yang lain dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang dalam usaha mereka untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.
9. Sikap pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat, perusahaan seringkali membahas struktur modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat memerhatikan saran mereka.
10. Kondisi pasar, kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Perusahaan berperingkat rendah yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek tanpa melihat sasaran struktur modalnya.
11. Kondisi internal perusahaan, kondisi internal perusahaan juga dapat memiliki sikap dalam menentukan struktur modalnya.
12. Fleksibilitas keuangan, dari sudut pandang operasional mempertahankan kecukupan “cadangan kapasitas pinjaman” menentukan “kecukupan” berdasarkan penilaian, tetapi tergantung pada kebutuhan perusahaan yang diperkirakan dari kebutuhan dana di masa depan, kondisi pasar modal, kepercayaan manajemen terhadap masa depan, dan konsekuensi dari keuangan modal”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019) pendanaan menggunakan utang memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan dibandingkan saham biasa, yaitu:

1. “Kendali pemegang saham tidak terpengaruh karena kreditur tidak memiliki hak suara seperti yang dimiliki pemegang saham sehingga kendali atas perusahaan secara penuh tetap di tangan pemegang saham.
2. Beban bunga dari utang dapat dijadikan biaya pengurang dalam pajak, sedangkan dividen tidak.
3. Meskipun beban bunga dari utang dapat mengurangi laba bersih, laba per lembar saham akan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan utang karena tidak ada saham tambahan yang diterbitkan”.

Menurut Kasmir (2013) dalam Arsita (2021) “rasio *leverage* yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Debt ratio*, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rata-rata industri untuk *debt ratio* adalah 35%.
2. *Debt to equity ratio*, rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
3. *Long-term debt to equity ratio*, rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang bertujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
4. *Times interest earned*, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga”.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)*. Menurut Maulita dan Tania (2018) “*DAR* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”. Menurut Syamsuddin (2006) dalam Andhani (2019), “semakin tinggi rasio *DAR* berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan

bagi perusahaan”. Pernyataan ini didukung oleh Siddiq dkk. (2020), “apabila dalam suatu bank (perusahaan) lebih banyak dibiayai oleh utang atau memiliki utang yang lebih besar daripada asetnya, maka akan berisiko bagi bank (perusahaan) dalam hal kesulitan mengelola keuangannya”. Dengan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dengan *DAR* yang rendah artinya perusahaan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan jumlah utangnya. *DAR* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Weygandt *et al.*, 2019)

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

DAR : *Debt to asset ratio* (rasio utang terhadap aset).

Total Liabilities : Total utang.

Total Assets : Total aset.

Total utang merupakan total dana yang berasal dari eksternal perusahaan. Menurut Kieso *et al.* (2018), “mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar pada sumber daya perusahaan, mengandung manfaat ekonomi”. Menurut Kasmir (2014) dalam Trianto (2017) “total utang merupakan keseluruhan total utang lancar dan total utang tidak lancar”. Liabilitas (utang) dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu liabilitas jangka pendek (*current liabilities*) dan liabilitas jangka panjang (*non-current liabilities*). “Liabilitas jangka pendek adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam jangka waktu satu tahun (12 bulan) atau selama siklus operasi perusahaan, sedangkan liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan perusahaan dapat dibayar lebih dari satu tahun di masa mendatang (Weygandt *et al.*, 2019)”. Liabilitas jangka pendek dicatat sebelum liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

IAI (2022) menyebutkan “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

1. Entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan;
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk dilunasi dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak pada akhir periode pelaporan untuk menanggukkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang”.

Beberapa contoh utang jangka pendek menurut Kieso *et al.* (2018) adalah “*accounts payable, notes payable, current maturities of long-term debt, short-term obligations expected to be refinanced, dividends payable, customer advances and deposits, unearned revenues, sales and value-added taxes payable, income taxes payable, dan employee-related liabilities. Accounts payable* adalah saldo terutang kepada pihak lain atas pembelian barang, perlengkapan, atau jasa. *Notes payable* adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal yang telah disepakati di masa yang akan datang. *Current maturities of long-term debt* adalah bagian dari liabilitas jangka pendek berupa obligasi, utang hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo pada tahun fiskal berikutnya. *Short-term obligations expected to be refinanced* adalah utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan atau siklus normal operasi perusahaan. *Dividends payable* adalah jumlah terutang perusahaan kepada pemegang saham atas hasil otorisasi dewan direksi. *Customer advances and deposits* adalah penerimaan deposit dari pelanggan atau karyawan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan perusahaan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran obligasi masa depan yang diharapkan (Kieso *et al.*, 2018)”.

“*Unearned revenues* adalah pendapatan diterima di muka oleh perusahaan namun belum melakukan kewajibannya. *Sales and value-added taxes payable* adalah kewajiban perpajakan yang timbul akibat transaksi jual dan beli barang/jasa kena pajak

(PPN). *Income taxes payable* adalah kewajiban perpajakan yang timbul atas penghasilan yang didapat perusahaan (semua jenis pajak selain PPN). *Employee-related liabilities* adalah jumlah terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah untuk akhir periode akuntansi (Kieso *et al.*, 2018)”.

Weygandt *et al.* (2019) memberikan beberapa contoh *non-current liabilities* (utang jangka panjang) seperti “*bonds payable, mortgages payable, long-term notes payable, lease liabilities, dan pension liabilities*”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*bonds payable* adalah suatu bentuk utang wesel yang berbunga”. “*Mortgages payable* adalah surat perjanjian utang yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek dengan properti sebagai jaminannya. *Long-term notes payable* adalah utang wesel yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (Kieso *et al.*, 2018)”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*lease liabilities* adalah perjanjian kontrak antara pemberi sewa (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*)”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “*pension liabilities* adalah kewajiban dari pengaturan yang dilakukan pemberi kerja berupa keuntungan kepada karyawan yang sudah pensiun untuk layanan yang telah mereka lakukan selama tahun mereka bekerja”.

Menurut Jusuf (2010) dalam Tanjung (2018) “aktiva (aset) dapat didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”. Aset lancar dicatat sebelum aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Menurut Weygandt *et al.* (2019), aset dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. “Aset lancar (*current assets*) adalah aset yang diharapkan oleh perusahaan untuk dikonversi ke dalam uang tunai (kas) atau digunakan dalam satu periode atau satu siklus operasi. Contohnya adalah kas, investasi jangka pendek, *prepaid expenses*, piutang, dan persediaan.
2. Aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah kelompok aset yang tidak termasuk definisi aset lancar. Aset tidak lancar terbagi menjadi:
 - a. *intangible assets* (aset tidak berwujud) adalah aset perusahaan yang memiliki umur panjang dan tidak memiliki bentuk fisik namun sangat berharga. Contohnya adalah *goodwill*, paten, hak cipta, dan merek dagang.

- b. *property, plant, and equipment (PPE)* adalah aset dengan umur manfaat yang relatif lama dan berguna untuk mengoperasikan bisnis saat ini. Contohnya adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan.
- c. *long-term investments* (investasi jangka panjang) pada umumnya adalah:
 1. investasi pada surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang.
 2. aset tidak lancar seperti tanah ataupun bangunan perusahaan yang saat ini tidak digunakan dalam kegiatan operasinya.
 3. investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti *sinking fund*, *pension fund*, atau *plant expansion fund*.
 4. investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi.
- d. *other assets* dalam praktiknya memiliki banyak macam seperti *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*, aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan *restricted cash*".

2.6 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Earnings per Share*

Menurut Utari dkk. (2014) dalam Juliana dan Arif (2019) "*leverage* keuangan (*financial leverage*) yaitu penggunaan utang tinggi untuk menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi". Menurut Sartono (2010) dalam Juliana dan Arif (2019) "*financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham". Hal tersebut menandakan bahwa "semakin tinggi *DAR* menunjukkan makin berisiko bank (perusahaan) karena makin besarnya kewajiban yang digunakan dalam pembelian asetnya. Jika perusahaan meminjam dalam jumlah yang besar dan tidak dapat membayar utangnya maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Dapat dikatakan apabila suatu perusahaan lebih banyak utang daripada asetnya maka akan berisiko bagi perusahaan karena akan muncul kesulitan dalam

mengelola keuangan (Prakarsa dan Setiawan, 2018 dalam Siddiq dkk., 2020)". Pendapat tersebut dipersingkat oleh Pohan (2020) "semakin kecil *DAR* artinya semakin baik karena beban bunga yang dikenakan akan lebih ringan sehingga pendapatan yang diperoleh untuk dibagikan (kepada pemegang saham) lebih besar".

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Ambaranny dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa rasio *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *EPS*. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis pertama dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha1: *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas yang diprosikan dengan *Earnings per Share*.

2.7 Kualitas Audit

Menurut Kurnia dan Mella (2018), "kualitas audit merupakan sebuah kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan material dan seorang auditor akan dapat menemukan dan kemudian melaporkan kekeliruan material tersebut". "Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor (Yunia, 2018)". "Kualitas audit yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik) karena nama baik perusahaan sangat lah penting, kualitas auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan auditornya. Kualitas audit dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four* (Amrizal dan Rohmah, 2017)".

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik di dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan "KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha

berdasarkan Undang-Undang ini”. Dalam bab 2 pasal 3, disebutkan “akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi:

1. Jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas yang dimaksud adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi/reasuransi, atau badan usaha milik negara (BUMN) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 20 tahun 2015 bab 5 pasal 11).
2. Jasa revidi atas informasi keuangan historis adalah perikatan asuransi yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.
3. Jasa asuransi lainnya adalah perikatan asuransi selain jasa audit atau revidi atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asuransi lainnya antara lain perikatan asuransi untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum”.

Berdasarkan ojk.go.id, “*comfort letter* adalah surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya Informasi atau Fakta Material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal *comfort letter* yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau pendapatan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus”.

Menurut Putri, Kurniawan, dan Salida (2022) “*auditing* adalah suatu proses pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, agar dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pemberian pendapat (opini) atas kewajaran laporan keuangan tersebut”. Mulyadi (2013) dalam Tresnawaty (2022) menyebutkan definisi “opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip

akuntansi berlaku umum”. Opini audit oleh auditor menurut Mulyadi (2002) dalam Sulbahri dkk. (2021) terdiri dari:

1. “Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*);
3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*);
5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)”.

2.8 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Earnings per Share*

Menurut Ambaranny dkk. (2021), “*audit quality* merupakan faktor yang juga sama pentingnya seperti rasio keuangan, di mana pihak investor maupun eksternal lainnya sangat bergantung dengan auditor yang nantinya akan memeriksa ketepatan penyajian laporan keuangan”. Menurut Mayangsari (2004) dalam Yunia (2018), “investor akan bergantung pada akuntan publik sebagai penjamin keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan atas kredibilitas laba yang dilaporkan karena investor tidak dapat melihat langsung hal-hal yang mendasari nilai laba yang sesungguhnya”. Oleh sebab itu, menurut Ambaranny dkk. (2021) “auditor sebagai pihak eksternal dan independen dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal dan tingkat kejujuran tinggi dalam memberikan opini mereka.”

“Kualitas audit yang tinggi dapat dilihat dari ukuran besarnya KAP. KAP yang besar mempunyai sumber daya yang besar untuk meningkatkan kualitas audit. Di Indonesia ada empat akuntan publik besar yang dikenal dengan *Big Four*, terdiri dari PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Deloitte, dan Ernst & Young (EY). Pada penelitian yang dilakukan oleh DeAngelo (1981) dalam Yunia (2018), “menyatakan bahwa auditor *Big Four* diakui sebagai auditor yang berkualitas dibandingkan dengan auditor *Non-Big Four*, hal ini dibuktikan dengan emiten yang terdaftar di bursa sebagian besar merupakan klien dari auditor *Big Four*”. Akuntan publik *Big Four*

memiliki spesialisasi dalam melakukan audit yang dilakukan sehingga mereka memiliki kualitas audit yang memadai. kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik akan memberikan keyakinan yang memadai pada investor, termasuk keyakinan investor akan adanya *earning per share (EPS)* (Yunia, 2018)”.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap *earnings per share* menunjukkan hasil yang berpengaruh. Penelitian yang telah dilakukan Ambaranny dkk. (2021) dan Yunia (2018) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *earnings per share* perusahaan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis kedua dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha2: Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan *Earnings per Share*.

2.9 Ukuran Perusahaan

Menurut Riawan (2020) “ukuran perusahaan merupakan representasi dari jumlah kekayaan perusahaan yang diinterpretasikan dalam wujud kepemilikan aset”. “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Lebih lengkapnya, ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Nazir dan Agustina, 2018)”.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. 53 /POJK.04/2017 di dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan dua jenis emiten (badan usaha) yaitu:

1. “Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran, serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah dan/atau

- perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran, serta tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah dan/atau perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 3. Emiten dengan Aset Skala Besar yang selanjutnya disebut Emiten Skala Besar adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)".

Menurut Shinta dan Laksito (2014) dalam Riawan (2020) "perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar akan mampu menciptakan keuntungan semaksimal mungkin dan akan berdampak pada peningkatan laba per lembar saham". Selain itu menurut Lumoly, Murni, dan Untu (2018) "perusahaan yang besar akan membuat perusahaan lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil, karena memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi sehingga mampu menghadapi persaingan ekonomi". "Total aset yang besar dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap dewasa di mana perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain itu juga dengan total aset yang besar mencerminkan bahwa perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil (Sanjaya dan Suryadi, 2018)".

Menurut Umam, Wijayanto, dan Kodir (2019) "ukuran perusahaan ditunjukkan melalui logaritma natural total aset karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode". Dalam jurnalnya Pohan (2020) menjelaskan "bentuk logaritma

digunakan karena pada umumnya nilai aset perusahaan sangat besar sehingga untuk menyamakan dengan variabel lain menggunakan naturalisasi total aset”.

$$SIZE = \ln(\text{Total Assets}) \quad (2.4)$$

Keterangan:

SIZE : Ukuran perusahaan.

Ln Total Assets : Logaritma natural dari total aset.

“Aset adalah sumber daya ekonomik kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi (IAI dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), 2019)”. “Semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil (Lumoly, Murni, dan Untu, 2018)”. Dasar pengukuran aset menurut IAI dalam KKPK (2019):

1. “Biaya historis, aset dicatat sebesar nilai dari biaya yang terjadi untuk memperoleh atau membuat aset, yang terdiri dari imbalan yang dibayarkan untuk memperoleh atau membuat aset ditambah biaya transaksi.
2. Nilai kini, pengukuran ini memberikan informasi moneter tentang aset menggunakan informasi yang dimutakhirkan untuk mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran. Dasar pengukuran nilai kini mencakup:
 - Nilai wajar, aset dicatat sebesar harga yang akan diterima saat menjual aset. Nilai wajar dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar aktif.
 - Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas, atau manfaat ekonomik lainnya, yang entitas perkirakan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan akhirnya.

- Biaya kini adalah biaya atas aset yang setara pada tanggal pengukuran, yang terdiri dari imbalan yang akan dibayarkan pada tanggal pengukuran ditambah biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut”.

2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Earnings per Share*

Menurut Sujianto (2001) dalam Umam, Wijayanto, dan Kodir (2019) “ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan asset, dan rata-rata total aktiva”. “Dengan total aset yang besar efektivitas dalam melakukan operasi akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil. Perusahaan yang memiliki aset yang banyak dan dapat dikelola dengan baik, maka akan mendorong besarnya pendapatan perusahaan yang akan diperoleh dalam periode tertentu (Riawan, 2020)”. “Oleh karena itu perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar akan mampu menciptakan keuntungan semaksimal mungkin dan akan berdampak pada peningkatan laba per lembar saham (Shinta dan Laksito, 2014 dalam Riawan, 2020)”.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umam, Wijayanto, dan Kodir (2019), serta Riawan (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *earnings per share*. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis ketiga dapat dipaparkan sebagai berikut:

Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang diprosikan dengan *Earnings per Share*.

2.11 Likuiditas

Likuiditas menurut Abadi dan Hermansyah (2019), “merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih keseluruhan”. “Perusahaan yang tidak mampu

membayar seluruh atau sebagian utang yang sudah jatuh tempo atau terkadang perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar kewajibannya tepat waktu akan sangat mengganggu hubungan baik antara perusahaan dengan para kreditur, atau juga dengan distributor. Dalam jangka panjang, kasus ini akan berdampak pula kepada para pelanggan. Artinya pada akhirnya perusahaan akan memperoleh krisis kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran usahanya (Kasmir, 2021)". Menurut Weygandt *et al.* (2019), "rasio likuiditas terbagi menjadi:

1. *Current ratio* sering digunakan untuk mengevaluasi likuiditas sebuah perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendeknya. *Current ratio* biasanya dikaitkan dengan *working capital ratio* (rasio modal kerja). Modal kerja dihitung dengan mengurangi aset lancar dengan liabilitas lancar. Namun, *current ratio* indikator yang lebih dapat diandalkan dalam hal likuiditas dibandingkan modal kerja.
2. *Acid-test ratio* merupakan alat ukur likuiditas jangka pendek langsung perusahaan. Rumus untuk rasio ini dengan menjumlahkan kas, investasi jangka pendek, dan piutang (net) dibagi dengan liabilitas lancar.
3. *Accounts receivable turnover*, likuiditas dapat diukur dengan melihat seberapa cepat perusahaan dapat mengkonversikan aset tertentu menjadi kas. Rumusnya adalah membagi penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang bersihnya.
4. *Inventory turnover* mengukur seberapa banyak, rata-rata, persediaan dijual selama periode tersebut. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas dari persediaan. Rumusnya dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan".

Dalam penelitian ini, rasio likuiditas diproksikan dengan *current ratio* (CR/rasio lancar). "*Current ratio* merupakan rasio untuk melihat seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Apabila CR rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang (Kurniasari, 2020)". Sebaliknya menurut Jannah dan Rahayu (2018), "CR yang tinggi pada suatu perusahaan dapat memberikan jaminan yang baik bagi kreditur jangka pendek dalam memandang kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya". Menurut Kurniasari (2020), "dalam praktiknya sering kali dipakai

bahwa *current ratio* dengan standar 200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan”. Menurut Weygandt *et al.* (2019) rumus untuk mengukur *current ratio* adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \quad (2.5)$$

Keterangan:

CR : *Current ratio* (rasio lancar).

Current Assets : Aset lancar.

Current Liabilities : Liabilitas lancar (jangka pendek).

Menurut Kieso *el al.* (2018) “aset lancar adalah kas atau aset lain yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan dalam operasi dalam satu siklus operasi atau dalam satu tahun”. Dalam laporan keuangan, aset lancar terletak di bagian laporan posisi keuangan (*statement of financial position*). Weygandt *et al.* menyebutkan beberapa akun umum yang tergolong *current assets*, “*cash, investments, receivables, inventories, and prepaid expenses (supplies and insurance)*”.

Menurut Kieso *el al.* (2018) dikatakan liabilitas lancar apabila salah satu dari dua kondisi terpenuhi, kondisi yang dimaksud adalah “liabilitas tersebut diperkirakan selesai dalam siklus normal operasi perusahaan atau liabilitas diperkirakan selesai dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan”. Sama seperti aset lancar, letak liabilitas lancar berada di laporan posisi keuangan sebelum liabilitas tidak lancar (utang jangka panjang). Menurut Weygandt *et al.* liabilitas lancar biasanya terdiri dari “*notes payable, value-added and sales taxes payable, unearned revenue, salaries and wages, current maturities of long-term debt*”.

2.12 Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap *Earnings Per Share*

Menurut Jannah dan Rahayu (2018), “*current ratio* atau disebut juga rasio lancar merupakan salah satu cara mengukur rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih”. Menurut Fadli dan Suraya (2020), “*CR* yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang tunai atau aset jangka pendek lainnya dibandingkan dengan nilai saat ini atau likuiditas yang lebih rendah daripada aset jangka pendek, dan sebaliknya”. “Peningkatan *current ratio* memberi gambaran bahwasannya sebuah usaha milik seseorang dapat menutupi sebuah kewajiban dalam jangka pendeknya serta selalu dibarengi dengan kenaikan dari persentase sebuah *earning per share*”

Hasil penelitian yang telah dilakukan Jannah dan Rahayu (2018) dan Faruq dkk. (2021) menunjukkan hasil yang secara simultan berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis keempat dapat dipaparkan sebagai berikut:

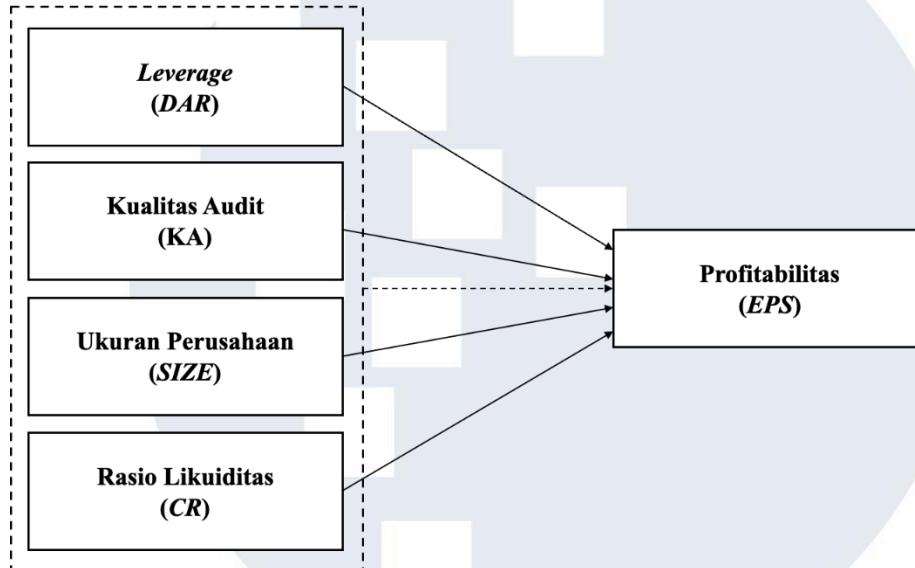
Ha₄: Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan *Earnings per Share*.

2.13 Pengaruh *Leverage (DAR)*, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Rasio Likuiditas (*CR*) Terhadap Profitabilitas (*EPS*) Secara Simultan

Hasil penelitian yang dilakukan Stefhani (2019) menunjukkan “secara simultan ukuran perusahaan, struktur modal, dan *operating leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas”. Fadli dan Suraya (2019), “*DAR* dan *ROE* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *EPS*”. Selanjutnya, hasil penelitian Yanto dan Bawono (2021) menunjukkan “variabel *audit report*, *audit firm*, *current ratio*, komisaris, direksi, komisaris independen, komite audit, & kepemilikan institusional dengan simultan mensugesti variabel *earning per share*”.

2.14 Model Penelitian

Model penelitian yang digambarkan sesuai dengan hipotesis yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian